

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2024). Tingkat kemiskinan sebagai persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional (Todaro & Smith, 2020). Tingkat kemiskinan mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam mempertahankan standar hidup layak serta kerentanannya terhadap berbagai tekanan ekonomi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut Nurkse (1958) menjelaskan teori lingkaran setan kemiskinan sebagai keterkaitan timbal balik antara rendahnya produktivitas, pendapatan, tabungan, investasi, dan kesempatan pasar yang menyebabkan negara miskin tetap miskin. Hubungan timbal balik antar faktor tersebut menyebabkan masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan dan sulit keluar tanpa adanya perubahan struktural dalam perekonomian (Todaro & Smith, 2020).

Tingkat kemiskinan juga memiliki karakteristik yang bersifat struktural, di mana permasalahan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur perekonomian yang belum mampu menyediakan kesempatan ekonomi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Struktur ekonomi yang belum inklusif menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada pada aktivitas ekonomi berproduktivitas rendah dan memiliki peluang terbatas untuk meningkatkan taraf hidupnya (Todaro & Smith, 2020).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kemiskinan dipahami sebagai permasalahan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja produktif, rendahnya produktivitas tenaga kerja, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pengembangan sektor industri (Todaro & Smith, 2020). Menurut Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan sektor industri, serta perbaikan akses terhadap infrastruktur dasar. Apabila proses pembangunan tersebut tidak berjalan secara optimal, maka kemiskinan cenderung bersifat persisten dan sulit diturunkan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, tingkat kemiskinan dalam penelitian ini dipahami sebagai permasalahan pembangunan yang berkaitan erat dengan kondisi penyerapan tenaga kerja mikro, keterbatasan akses infrastruktur listrik, serta belum

optimalnya peran industri pengolahan non-migas dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Tenaga Kerja Mikro

2.1.2.1 Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi (Agusalim, 2022:34). Tenaga kerja dipahami sebagai penduduk usia kerja yang mampu melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (Suhartini et al., 2020:35). Berdasarkan peran tersebut, secara teoritis kontribusi tenaga kerja sebagai faktor produksi dapat dijelaskan melalui fungsi produksi Neoklasik sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, A)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan

K : Modal

L : Tenaga Kerja

A : Teknologi dan Efisiensi

Dalam konteks tenaga kerja, keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi menyebabkan kontribusi tenaga kerja terhadap output dan pendapatan menjadi relatif rendah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kemampuan rumah tangga pekerja mikro untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara optimal dalam proses produksi. Untuk memahami bagaimana tenaga kerja ini mempengaruhi kemiskinan secara lebih mendalam, konsep ini didukung oleh Teori *Dual Labor Market* (Doeringer & Piore, 1971). Teori ini menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja tidaklah tunggal, melainkan terbagi menjadi dua segmen:

1. Sektor Primer (*Primary Sector*):

Sektor ini terdiri dari pekerjaan yang menawarkan upah tinggi, kondisi kerja yang baik, stabilitas pekerjaan, serta jaminan perlindungan hukum yang kuat. Di sektor ini, tenaga kerja didukung oleh tingkat modal yang tinggi dan teknologi yang maju, sehingga produktivitas marginalnya besar. Hal ini memungkinkan pekerja memperoleh pendapatan yang jauh di atas garis kemiskinan dan memiliki akses terhadap mobilitas karier ke atas.

2. Sektor Sekunder (*Secondary Sector*):

Sektor ini ditandai dengan upah yang rendah, jaminan kerja yang rendah (mudah terkena PHK), serta lingkungan kerja yang kurang memadai. Pekerja di sektor ini umumnya memiliki akses terbatas terhadap modal dan teknologi, yang menyebabkan produktivitas mereka tetap rendah. Karakteristik pekerjaan di sektor sekunder inilah yang sering kali menjadi kantong kemiskinan, di mana individu bekerja dalam durasi yang lama namun tetap tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan (*working poor*).

Tenaga kerja tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk terserap dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Semakin besar tenaga kerja yang dapat bekerja pada unit-unit usaha, termasuk usaha berskala mikro dan kecil, maka semakin besar pula potensi penciptaan pendapatan bagi rumah tangga. Penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor produktif tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu mekanisme utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Agusalim, 2022:59).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, peran tenaga kerja menjadi sangat strategis karena penciptaan dan perluasan kesempatan kerja mampu memberikan pendapatan yang layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta membantu mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja menjadi kebijakan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan (Agusalim, 2022:102).

2.1.2.2 Pembagian Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja Formal

Sektor formal merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki struktur organisasi dan kelembagaan yang lebih jelas, dengan hubungan kerja yang relatif tetap serta tingkat produktivitas yang cenderung lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih stabil bagi pekerja (Utami et al., 2023:38). Keberadaan sektor formal berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, keterbatasan daya serap sektor formal menyebabkan tidak seluruh angkatan

kerja dapat tertampung, terutama tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah (Utami et al., 2023:40).

b. Tenaga Kerja Informal

Sektor informal merupakan kegiatan usaha berskala kecil dan sederhana yang umumnya dikelola oleh individu atau keluarga, dengan penggunaan teknologi yang terbatas dan bersifat padat karya (Utami et al., 2023:39). Di dalam sektor informal berkembang unit-unit usaha berskala sangat kecil yang dikenal sebagai usaha mikro dan usaha kecil. Secara yuridis, usaha mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana klasifikasi usaha didasarkan pada skala aset dan omset usaha (UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 6).

Dalam praktiknya, usaha mikro dan kecil memiliki ciri modal terbatas, teknologi sederhana, jumlah tenaga kerja sedikit, namun jumlah unit usahanya sangat banyak dan tersebar luas (BPS, 2023). Karena sifatnya yang mudah dimasuki dan padat karya, usaha mikro dan kecil menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, terutama bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Karena rendahnya hambatan masuk (*barrier to entry*), sektor ini menjadi tumpuan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal manusia untuk tetap menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Utami et al., 2023:42).

Dengan demikian, pembagian tenaga kerja ke dalam sektor formal dan informal menunjukkan bahwa sebagian besar dinamika kesempatan kerja bagi

kelompok masyarakat bawah terjadi pada usaha mikro dan kecil di sektor informal. Oleh karena itu, perubahan dalam penyerapan tenaga kerja pada skala mikro menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan, karena peningkatan kesempatan kerja pada sektor ini berpotensi langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan.

2.1.2.3 Teori *Human Capital*

Teori *human capital* menjelaskan bahwa manusia merupakan aset utama dalam proses produksi dan pembangunan ekonomi. *Human capital* mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki individu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Kualitas *human capital* menentukan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output secara efisien dan produktif (Utami et al., 2023:104).

Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan output, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam kerangka ini, kualitas *human capital* menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Utami et al., (2023), peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja, yang

selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekonomi. Sebaliknya, rendahnya kualitas *human capital* menyebabkan menurunnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta terbatasnya kesempatan kerja yang layak. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan yang diterima individu dan berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Ilahi 2023:109).

Sejalan dengan Todaro dan Smith (2020), rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sering kali menyebabkan individu hanya terserap pada sektor berproduktivitas rendah, khususnya sektor informal pada tenaga kerja mikro. Sektor ini umumnya ditandai dengan pendapatan yang tidak stabil, keterbatasan perlindungan kerja, serta rendahnya peluang mobilitas ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

Menurut Utami et al., (2023) menegaskan bahwa investasi pada *human capital* merupakan strategi jangka panjang yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam bekerja, tetapi juga memperluas peluang kerja dan memperbaiki distribusi pendapatan. Oleh karena itu, *human capital* memiliki peran strategis dalam menjelaskan hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemiskinan (Utami et al., 2023:114). Dalam konteks tenaga kerja mikro, keterbatasan kualitas *human capital* bisa menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

2.1.3 Akses Infrastruktur Listrik

2.1.3.1 Konsep Akses Listrik

Akses infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai prasyarat utama bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial. Infrastruktur dasar mencakup fasilitas fisik yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi, seperti transportasi, air bersih, dan listrik. Infrastruktur listrik memiliki peran yang sangat penting karena menyediakan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, baik pada sektor rumah tangga, usaha mikro, maupun industri (Todaro & Smith, 2020).

Akses infrastruktur listrik tidak hanya dipahami sebagai tersedianya jaringan listrik secara fisik, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan layanan listrik bagi masyarakat. Akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperbaiki kualitas hidup. Oleh karena itu, akses infrastruktur listrik dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

2.1.3.2 Peran Infrastruktur Listrik dalam Kegiatan Ekonomi

Akses infrastruktur listrik memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi karena listrik merupakan input utama dalam proses produksi.

Todaro & Smith, (2020), menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi, sehingga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Akses listrik memungkinkan penggunaan teknologi dan peralatan produksi yang lebih modern, memperpanjang jam kerja, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas output (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks usaha mikro dan kecil, akses listrik menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan usaha. Mursanti & Tumiwa (2019) menjelaskan bahwa keterbatasan akses listrik menyebabkan rendahnya produktivitas usaha mikro karena terbatasnya penggunaan peralatan produksi dan teknologi pendukung. Sebaliknya, ketersediaan listrik yang memadai dapat meningkatkan efisiensi usaha, memperluas skala produksi, serta mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro.

Selain itu, (UNIDO, 2019) menegaskan bahwa infrastruktur listrik merupakan prasyarat utama bagi pengembangan sektor industri pengolahan non-migas. Ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau mendukung proses industrialisasi, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya pada industri yang bersifat padat karya (UNIDO, 2019). Dengan demikian, infrastruktur listrik berperan sebagai faktor pendukung utama dalam peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.

2.1.3.3 Akses Infrastruktur Listrik dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

Akses terhadap infrastruktur listrik merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Todaro & Smith (2020), keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan

Ketersediaan akses listrik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi produktif, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga berkontribusi terhadap penurunan (Todaro & Smith 2020). Hal ini sejalan dengan David Aschauer (1989) yang menyatakan bahwa infrastruktur listrik sebagai bagian dari modal publik dan mampu meningkatkan produktivitas maupun output ekonomi.

Infrastruktur listrik memungkinkan masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pelaku usaha. Peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Efek pengganda ini ketika pendapatan yang diperoleh masyarakat dari aktivitas produktif berbasis listrik dibelanjakan kembali dalam ekonomi lokal, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (Keynes, 1936).

Ketersediaan akses listrik yang memadai mendorong pertumbuhan sektor industri dan usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah

besar. Proses ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja (UNIDO, 2019).

Selain melalui peningkatan pendapatan, akses listrik juga berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat miskin. Alkire et al., (2020), menegaskan bahwa akses energi, khususnya listrik, merupakan salah satu dimensi penting dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. Ketiadaan akses listrik membatasi kemampuan rumah tangga miskin untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta mengembangkan sumber pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan akses infrastruktur listrik tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui perluasan kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Industri Pengolahan Non-Migas

2.1.4.1 Konsep Industri Pengolahan Non-Migas

Industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang antara menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam klasifikasi ekonomi Indonesia, industri pengolahan non-migas mencakup seluruh kegiatan industri pengolahan selain industri minyak dan gas bumi, dan menjadi salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian nasional (BPS, 2023). Industri pengolahan non-migas

memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi karena menjadi sektor utama dalam proses industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan (UNIDO, 2019:15). Sektor ini berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyediaan pekerjaan formal yang lebih produktif (UNIDO, 2019:28). Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai ruang lingkup industri pengolahan non-migas, klasifikasi subsektor industri pengolahan non-migas di Indonesia disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Klasifikasi Subsektor Industri Pengolahan Non-Migas di Indonesia

No	Subsektor Industri Pengolahan Non-Migas	Keterangan Singkat
1.	Industri Makanan dan Minuman	Mengolah bahan pangan menjadi produk makanan dan minuman siap konsumsi; merupakan subsektor terbesar dan padat karya
2.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Meliputi pengolahan serat, benang, kain, hingga pakaian jadi; berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja
3.	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Mengolah bahan kulit menjadi barang jadi seperti sepatu dan tas
4.	Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Furnitur	Mengolah kayu menjadi produk setengah jadi dan barang jadi seperti mebel
5.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	Mengolah pulp menjadi kertas dan produk turunannya
6.	Industri Kimia Non-Migas	Menghasilkan produk kimia selain berbasis minyak dan gas bumi, seperti pupuk dan bahan kimia dasar

7.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Mengolah bahan kimia dan hayati menjadi produk kesehatan
8.	Industri Karet dan Barang dari Karet serta Plastik	Mengolah bahan karet dan plastik menjadi barang jadi dan setengah jadi
9.	Industri Logam Dasar Non-Migas	Mengolah logam dasar selain migas, seperti besi dan baja
10.	Industri Barang Logam, Mesin, dan Peralatannya	Menghasilkan barang logam, mesin industri, dan peralatan mekanik
11.	Industri Alat Angkutan	Meliputi kendaraan bermotor, kapal, dan alat transportasi lainnya
12.	Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	Meliputi furnitur non-kayu serta industri kreatif berbasis manufaktur

Berdasarkan Tabel 2.1, industri pengolahan non-migas mencakup berbagai subsektor yang bersifat padat karya dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja, khususnya di negara berkembang, yang pada akhirnya berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan (UNIDO, 2019:24). Sejalan dengan itu, *International Labour Organization* menyatakan bahwa sektor manufaktur memiliki peran penting dalam menyediakan pekerjaan formal dengan upah yang relatif lebih stabil dibandingkan sektor informal, sehingga mampu mengurangi kerentanan ekonomi dan risiko kemiskinan (ILO, 2014:18). Dengan demikian, industri pengolahan non-migas menjadi salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian nasional dan berperan strategis dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga pengembangan sektor ini dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan (BPS, 2023).

2.1.4.2 Industri Pengolahan Non-Migas dan Transformasi Ekonomi

Dalam teori pembangunan ekonomi, industrialisasi dipahami sebagai proses transformasi struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier yang memiliki tingkat produktivitas dan nilai tambah lebih tinggi. Teori transformasi struktural merupakan ciri utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara berkembang, karena memungkinkan terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar (Todaro & Smith, 2020).

Transformasi ini sejalan dengan model pertumbuhan solow (*Solow Growth Model*) yang menjelaskan pentingnya peningkatan output yang didukung oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam perspektif ini, pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Model surplus tenaga kerja yang dikemukakan oleh Lewis, (1954) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika tenaga kerja berlebih dari sektor tradisional berpindah ke sektor modern, khususnya sektor industri, yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Industri pengolahan non-migas berfungsi sebagai motor utama transformasi ini karena kemampuannya dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal (UNIDO, 2019: 16). Melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan

barang jadi, sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai apabila perpindahan tenaga kerja ke sektor industri diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang mampu menampung tenaga kerja dari sektor lain, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

2.1.4.3 Industri Pengolahan Non-Migas dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor industri dipandang sebagai sektor modern yang mampu menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional. Industri pengolahan non-migas, khususnya yang bersifat padat karya, memiliki kemampuan yang tinggi dalam menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah, hingga menengah karena ambang batas keterampilan yang beragam, sehingga industri ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan kesempatan kerja di sektor ini berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga dan berperan penting dalam pengurangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Menurut UNIDO (2019), menyatakan bahwa industri pengolahan non-migas tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dengan sektor penyedia bahan baku serta keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dengan sektor distribusi dan jasa. Dalam penelitian ini, industri pengolahan non-migas tidak hanya dilihat dari volume produksinya, tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga

kerja. Penyerapan tenaga kerja mencerminkan seberapa besar tenaga kerja yang dapat ditampung oleh sektor industri pengolahan non-migas dibandingkan dengan total tenaga kerja yang ada. Secara matematis, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non-migas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penyerapan Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Industri}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan non-migas mampu menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan total tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai penyerapan tenaga kerja, semakin besar kemampuan sektor industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan, yang kemudian berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat peran sektor industri dalam menurunkan tingkat kemiskinan (UNIDO, 2019).

Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non-migas tidak hanya mencerminkan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan produksi, tetapi juga menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas industri yang bersifat padat karya dan mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas (UNIDO, 2019). Perkembangan aktivitas produksi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi, baik secara langsung di sektor industri maupun secara tidak langsung melalui berbagai kegiatan ekonomi pendukung (Lewis, 1954). Dengan demikian, perkembangan industri pengolahan non-migas berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang

selanjutnya memperluas kesempatan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat (UNIDO, 2019). Meningkatnya penyerapan tenaga kerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rangkaian studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang dikaji. Keberadaan penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pembandingan serta penguat dalam menganalisis masalah yang diangkat pada penelitian ini. Ikhtisar dari berbagai penelitian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mustika & Hodijah, (2020). <i>Effect Of Labor And Number Of Micro And Small Enterprises (Mses) on Poverty Rate in Indonesia</i>	Variabel Dependen: Tenaga Kerja mikro Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan Wilayah: Indonesia	-	Secara Parsial: Tenaga Kerja dan Mikro Kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan:	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 3, July

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Tenaga Kerja Mikro berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	
2.	Natasuanda & Wenagama, (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PDRB Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali	Variabel Dependen: Tenaga Kerja Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan	Wilayah: Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Variabel Dependen: Tingkat Pendidikan Variabel Independen: PDRB	Secara Parsial: Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara Simultan: Tingkat Pendidikan, Jumlah Tenaga Kerja, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.10 No.1, Januari 2024
3.	Marbun & Muchtolifah, (2023). Pengaruh Tenaga Kerja dan PAD	Variabel Dependen: Tenaga Kerja Variabel Independen:	Wilayah: Kabupaten Ngawi Variabel Dependen: PAD	Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi: JUPE Vol. 11 No. 3 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Ngawi	Tingkat Kemiskinan		Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	
4.	Christiani & Nainupu, (2021). Peng aruh Akses Terhadap Internet, Listrik dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat	Variabel Independen: Akses Listrik Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Variabel Independen: Akses Internet dan PDRB per kapita Wilayah: Nusa Tenggara Timur	Secara Parsial: Akses Internet dan Akses Listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. PDRB tidak	JSTAR Vol.1 No.1, Juni 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019		Tahun: 2015- 2019	berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara Simultan: Akses Internet, Akses Listrik dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	
5.	Xiong et al., (2024). <i>Impact of Access to Electricity and Socio- Economic Environmen t on Poverty Reduction: An Empirical Study on Myanmar</i>	Variabel Independen: Akses Listrik Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Wilayah: Myanmar Variabel Independen: Lingkungan Sosio Ekonomi	Secara Parsial: Akses Listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Akses Listrik berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan	Energies Vol. 17 No. 5451 2024
6.	Andrianus & Alfatih, (2023). Pengaruh Infrastruktu r terhadap Kemiskinan dengan Menggunak an Data Panel 34	Variabel Independen: Infrastruktu r Listrik Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Wilayah: 34 Provinsi Indonesia	Secara Parsial: Sanitasi, Listrik dan Infrastruktur Jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	JSEP: Vol 2 No. 1. Juli 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi di Indonesia			Secara Simultan: Sanitasi, Listrik dan Infrastruktur Jalan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	
7.	Pratama & Projo et al., (2024) Analisis Industri Manufaktur, Investasi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia	Variabel Independen: Sektor Manufaktur Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Variabel Independen: Investasi dan Pengangguran Wilayah: Timur Indonesia	Secara Parsial: Industri Manufaktur dan Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Industri Manufaktur, Investasi, dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal of Developm ent Economic And Digitalizat ion Vol. 3, No. 1, 2024
8.	Misfaruddin et al., (2024) Analisis Faktor - Faktor yang	Variabel Independen: Industri Pengolahan Non-Migas	Wilayah: Sumatera Utara	Secara Parsial: IPM dan Industri Pengolahan berpengaruh negatif dan	Journal Of Analytical Research, Statistics And Computati

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Kemiskinan Di Sumatera Utara menggunakan regresi data panel	Variabel Dependen: Kemiskinan	Variabel Dependen: IPM	signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: IPM dan Industri Pengolahan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	on, Vol. 3. No. 2, September 2024
9.	Pusra et al., (2021) <i>Effect of Selected Economic Sectors on Poverty</i>	Variabel Independen: Industri Manufaktur Variabel Dependen: Kemiskinan	Wilayah: kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun: 2010-2019	Secara Parsial: Sektor Industri Pengolahan Manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Sektor Industri Pengolahan Manufaktur berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Journal of Business, Economics and Social Development Vol. 2, No. 1, 2021
10.	Aziz et al., (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, Akses Listrik, Akses Internet Dan Akses	Variabel Independen: akses listrik, Variabel Dependen: kemiskinan	Variabel Independen: jumlah penduduk, akses internet, dan akses sanitasi layak	Secara Parsial: Jumlah Penduduk dan Akses Internet tidak berpengaruh. Akses Listrik dan Akses Sanitasi Layak berpengaruh	Journal of Economic, Business and Accounting Vol.8 No.4 2025: 1529-1541

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sanitasi Layak Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Bagian Selatan		Wilayah: Sumatera Selatan	negatif signifikan Secara Simultan: Jumlah Penduduk, Akses Listrik, Akses Internet, dan Akses Sanitasi Layak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	
11.	Jayanthi, (2021). <i>The Effect of Electricity Development in Indonesia on Poverty and Income Inequality</i>	Variabel Independen: Akses Listrik Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Secara Parsial: Akses Listrik berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan: Pertumbuhan Ekonomi, akses listrik berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.22 No. 1 2021
12.	Ramadhan & Anas, (2025). Pengaruh Industri Mikro dan Kecil terhadap	Variabel Independen: Tenaga Kerja Mikro Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan	-	Secara Parsial: Tenaga Kerja Mikro berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat	Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol.6 No.3 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan di Indonesia	Wilayah: Indonesia		Kemiskinan. Sektor Produksi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Output IMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	
13.	Pembawa et al., (2024). Dampak Pembangun an Infrastrukt ur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2021	Variabel Independen: Akses Infrastrukt ur Listrik Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Wilayah: Indonesia	Tahun: 2014- 2021	Secara Parsial: Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Air Bersih berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara Simultan: Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Air Bersih berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	JSEP Vol.2 No.1 Juli 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Janah & Nuraini, (2020). Pengaruh Industri Sedang Dan Besar Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Gresik Tahun 2002-2016	Variabel Dependen: Industri Pengolahan Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan	Wilayah: Kabupaten Gresik Tahun: 2002-2016	Secara Parsial: Jumlah Industri Menengah dan Besar, Tenaga Kerja Industri Menengah dan Besar, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara Simultan: Jumlah Industri Menengah dan Besar, Tenaga Kerja Industri Menengah dan Besar, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	JIE Vol 4 No.1 Februari 2020
15.	Rachman et al., (2024). Analisis Dampak Pembangunan	Variabel Dependen: Infrastruktur Listrik	Wilayah: Kawasan Teluk Tomini	Secara Parsial: Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Air	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	an Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Teluk Tomini	Variabel Independen: Kemiskinan		berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Infrastruktur Listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Air, dan Infrastruktur Listrik berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	No. 3 September 2024
16.	Mustika & Hodijah, (2020). <i>Effect Of Labor And Number Of Micro And Small Enterprises (Mses) on Poverty Rate in Indonesia</i>	Variabel Dependen: Tenaga Kerja mikro Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan Wilayah: Indonesia		Secara Parsial: Tenaga Kerja Mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan: Tenaga Kerja Mikro secara simultan berpengaruh signifikan	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 3 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap Tingkat Kemiskinan	

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengungkapkan dan menentukan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap Tingkat kemiskinan. Kerangka pemikiran penelitian dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 Hubungan Tenaga Kerja Mikro terhadap Tingkat Kemiskinan

Tenaga kerja mikro merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan yang umumnya terlibat dalam usaha berskala kecil dengan keterbatasan modal dan teknologi, sehingga memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah (Siagian & Ningrum et al., 2022:33). Sebagian besar tenaga kerja mikro bekerja pada sektor informal dan usaha mikro yang bersifat padat karya, dengan pendapatan yang belum stabil dan rentan terhadap guncangan ekonomi (Agusalim, 2022:33).

Keterlibatan tenaga kerja mikro dalam kegiatan usaha menjadi sumber utama pendapatan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Namun, keterbatasan produktivitas dan skala usaha menyebabkan pendapatan yang diperoleh sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum

secara layak. Kondisi tersebut menjadikan tenaga kerja mikro sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan, terutama ketika tidak didukung oleh peningkatan keterampilan, akses modal, dan perlindungan ekonomi yang memadai (Sutiyo & Fadhilah, 2024:9).

Secara teoritis jumlah dan kondisi tenaga kerja mikro memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Semakin besar proporsi tenaga kerja mikro yang bekerja pada usaha berproduktivitas rendah, maka semakin besar pula potensi masyarakat berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mustika & Hodijah, (2020), Natasuanda & Wenagama, (2024), dan Marbun & Muchtolifah, (2023) yang menyatakan bahwa tenaga kerja mikro berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, tenaga kerja mikro diduga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Akses Infrastruktur Listrik terhadap Tingkat Kemiskinan

Infrastruktur listrik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Infrastruktur listrik memiliki peran yang sangat penting karena menyediakan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, baik pada sektor rumah tangga, usaha mikro, maupun industri Todaro & Smith, (2020). Ketersediaan listrik yang memadai memungkinkan masyarakat memanfaatkan peralatan dan teknologi produksi yang lebih efisien, sehingga mendorong peningkatan output dan pendapatan usaha, khususnya pada sektor usaha mikro dan industri rumah tangga (Sambodo et al., 2016:12).

Pembangunan akses listrik juga membuka peluang munculnya berbagai aktivitas ekonomi produktif, seperti usaha pengolahan makanan, konveksi, dan perdagangan skala kecil, yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik (Mursanti & Tumiwa, 2019:1). Sebaliknya, keterbatasan akses listrik menyebabkan rendahnya efisiensi usaha, terbatasnya jam operasional, serta rendahnya kualitas produk, yang pada akhirnya membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan (Sambodo et al., 2016:111). Muta'ali, (2025) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya akses infrastruktur listrik, dapat memperburuk kondisi tingkat kemiskinan masyarakat. Infrastruktur listrik berperan penting dalam menunjang aktivitas produksi, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperluas peluang pengembangan usaha mikro dan kecil. Keterbatasan akses listrik menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja mikro dan membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya mempertahankan kondisi kemiskinan

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, akses listrik tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (Sambodo et al., 2016:9). Oleh karena itu, keterbatasan akses infrastruktur listrik dapat menyebabkan tertahannya kondisi kemiskinan, sedangkan peningkatan akses listrik berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Alkire, 2021:8). Hal ini sejalan dengan penelitian Pembawa et al., (2024), Christiani &

Nainupu, (2021), dan Xiong et al., (2024) yang menyatakan bahwa akses infrastruktur listrik berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Maka dari itu, diasumsikan bahwa akses infrastruktur listrik berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

2.3.3 Hubungan Industri Pengolahan Non-migas terhadap Tingkat

Kemiskinan

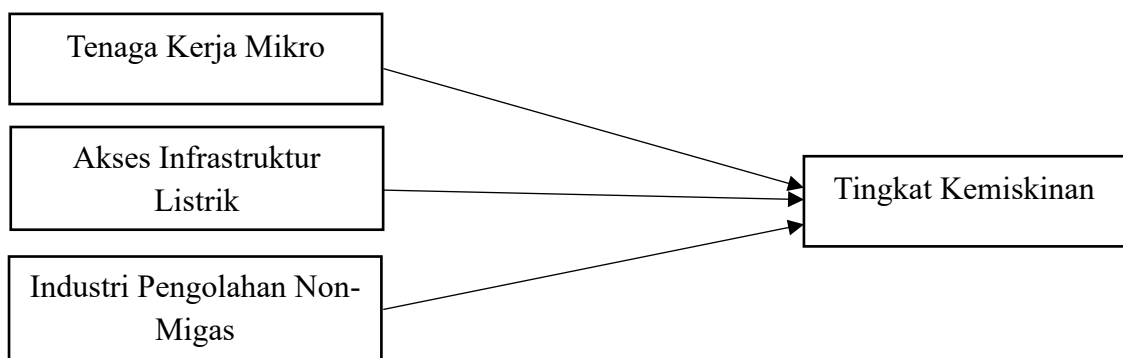
Industri pengolahan non-migas merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi karena berperan dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat (UNIDO, 2019:15). Perkembangan industri pengolahan mendorong transformasi struktural perekonomian melalui pergeseran tenaga kerja dari sektor primer berproduktivitas rendah ke sektor sekunder yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja lebih besar (UNIDO, 2019:16). Menurut Muta'ali (2025), struktur ekonomi dan perkembangan sektor industri memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan. Perkembangan sektor industri pengolahan non-migas mampu memperluas kesempatan kerja, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya perkembangan sektor ini menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dan rendahnya daya ungkit pembangunan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Di negara berkembang, industri pengolahan non-migas umumnya bersifat padat karya sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah dan rendah (ILO, 2014:52). Penyerapan tenaga kerja tersebut berkontribusi terhadap peningkatan

pendapatan rumah tangga melalui penyediaan lapangan kerja formal yang lebih stabil dibandingkan sektor informal (UNIDO, 2019:34). Dalam penelitian ini, industri pengolahan non-migas diproksikan melalui penyerapan tenaga kerja, yaitu rasio antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan non-migas terhadap total tenaga kerja bekerja. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk menangkap seberapa besar kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan total tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, industri pengolahan non-migas tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Secara teoritis, perkembangan industri pengolahan non-migas memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan aktivitas industri berpotensi menurunkan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Pratama Projo et al., (2024), Misfaruddin et al., (2024), dan Pusra et al., (2021) yang menyatakan bahwa industri pengolahan non-migas berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, diasumsikan bahwa industri pengolahan non-migas berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Ketiga variabel independen tersebut berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas dipandang relevan untuk digunakan dalam menganalisis dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis atau dugaan sementara yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga dalam jangka pendek tenaga kerja mikro berpengaruh positif, sementara akses infrastruktur listrik dan industri pengolahan non-migas berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2024.

2. Diduga dalam jangka panjang tenaga kerja mikro berpengaruh positif, sementara akses infrastruktur listrik dan industri pengolahan non-migas berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2024.